



Government (Hal.2)
Soal Kelanjutan
Bansos Pangan,
Jokowi: Lihat APBN
Dulu, tapi Tidak
Janji

SENJA KALA PPP

Hasil Final Rekapitulasi Nasional: PDIP Jawara, PSI Gagal

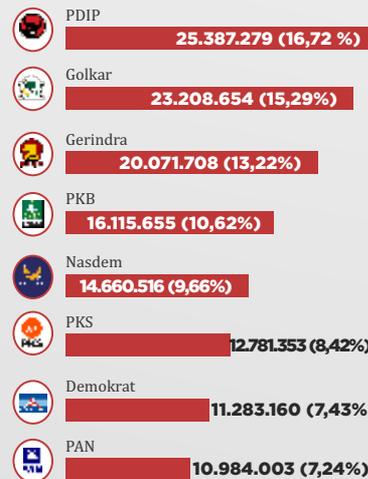
Sudah dikenal masyarakat lebih dari setengah abad, tak membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP atau P3) bisa mempertahankan posisinya di Senayan. Rekapitulasi nasional KPU menyebutkan, partai yang sudah ada sejak ordae baru era Soeharto ini gagal memenuhi ambang batas. Diketahui, partai berlambang Kabah tersebut hanya mampu meraup 5.878.777 suara (3,87%). Padahal aturan parliamentary threshold (PT) minimal mengantongi suara sebesar 4%. Meski sudah diprediksi berbagai lembaga survei dan kalangan pengamat, tapi hasil tersebut tetap mengejutkan. Partai yang saat ini dinakhodai Muhamad Mardiono itu pun memutuskan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kepedihan ganda memang menerpa PPP, karena di sisi lain jagoannya dalam Pilpres-paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud- juga kalah. Beda dengan PDIP, meski Capresnya kalah tapi berhasil mencetak hatrrick atau menang tiga kali beruntun dalam pemilu legislatif (pileg) DPR RI. Partai berlambang kepala Banteng ini sukses memborong 25.387.279 suara (16,72) dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Selain PPP, ada 9partai dinyatakan gagal lolos ke DPR RI yaitu PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, PKN.

Baca di hal 11...

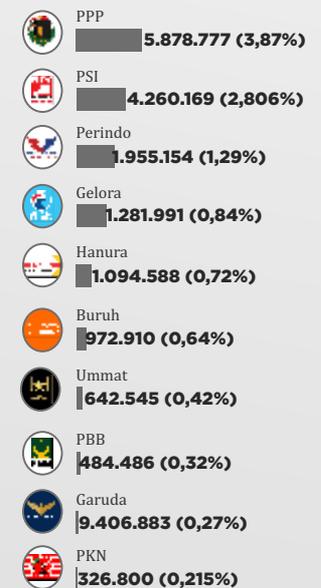
CALEG DPRD DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK

CALEG	PEROLEHAN SUARA	PARTAI	DAPIL
Said Abdulla	528.815	PDIP	Jatim XI
Dedi mulyadi	375.658	Gerindra	Jabar VII
Baidowi	359.189	PPP	Jatim XI
Edhie Baskoro Yudhoyono	318.223	Demokrat	Jatim VII
Hillary Brigitta Lasut	310.780	Demokrat	Sulut
Airin Rachmi	302.878	Golkar	Banten III
Puan Maharani	297.366	PDIP	Jateng V
I Nyoman Parta	281.688	PDIP	Bali
Fauzi Amro	281.499	Nasdem	Sumsel I
Sofyan Tan	279.334	PDIP	Sumut 1
Cucun Ahmad Syamsurijal	267.778	PKB	Jabar II

8 PARNPOL YANG LOLOS KE DPR RI



10 PARNPOL YANG GAGAL LOLOS KE DPR RI



JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1445 H/2024 KOTA SURABAYA

TANGGAL	18 Mar 2024	19 Mar 2024	20 Mar 2024	21 Mar 2024	22 Mar 2024	23 Mar 2024	24 Mar 2024
IMSAK	04:08	04:08	04:08	04:08	04:08	04:08	04:08
SUBUH	04:18	04:18	04:18	04:18	04:18	04:18	04:18
TERBIT	05:30	05:30	05:30	05:30	05:30	05:30	05:30
DUHA	05:57	05:57	05:57	05:57	05:57	05:57	05:57
ZUHUR	11:40	11:40	11:40	11:40	11:39	11:39	11:39
ASAR	14:51	14:51	14:52	14:52	14:51	14:51	14:52
MAGHRIB	17:43	17:43	17:43	17:42	17:41	17:41	17:40
ISYAH	18:52	18:51	18:51	18:51	18:50	18:49	18:49

Soal Kelanjutan Bansos Pangan Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Tidak Janji

JAKARTA- Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak berjanji soal kelanjutan program bansos pangan, yang seharusnya berhenti sampai Juni 2024. Dia mengatakan, pemerintah akan memantau ketersediaan anggarannya.

"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," ujar Jokowi ketika bertemu warga di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran bantuan sosial atau Bansos pemerintah mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp9,6 triliun.

"Anggaran Bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa (19/3/2024).

Realisasi tersebut terdiri dari lima pos. Pertama, untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Rinciannya antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Kelompok Penerima Manfaat atau KPM dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,7 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 juta peserta.

Sementara untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak Rp 900 miliar. Dana ini dialokasikan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.000 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa.

Anggaran berikutnya dialirkan ke Kementerian Agama sebesar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa.

Terakhir, sebanyak Rp 800 miliar dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan tanggap darurat bencana.

KPK Minta Setop Bansos Sebelum Pilkada

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta agar tidak ada penyaluran bantuan sosial



Presiden Joko Widodo mengunjungi kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) Rabu (20/3/2024). (BIRO ADPIM PEMPROV KALBAR)

(bansos) sebelum Pilkada. Bahkan, Alex mengimbau agar larangan penyaluran bansos sebelum kontestasi itu dibuatkan aturannya, agar mengikat.

"Saya, sih, berharap ada perda (peraturan daerah) atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada," kata Alex dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3/2024).

"Coba upaya Bapak-Ibu sekalian. Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," ungkap Alex di hadapan perwakilan Kemendagri dan BPKP.

Alex menyebut, jika serius untuk

memberikan bansos, maka bisa dilakukan saat ini jauh sebelum Pilkada atau nanti setelah Pilkada. "Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan. Menjelang pilpres kan banjir bansos dan masyarakat senang sekali dan kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," kata Alex.

"Sesuai dengan survei kami di KPK, bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama-tama, apa Bapak Ibu sekalian? Faktor uang. Itu. Itu dari survei kami di KPK," sambungnya.

Atas dasar hal tersebut, lanjut Alex, program Monitoring Center For Prevention (MCP) akan difokuskan untuk memantau anggaran-anggaran

seperti bansos tersebut. MCP ini aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. "Makanya menjadi program MCP untuk 2024 itu memantau anggaran hibah, bansos, dana pikir (pokok pikiran)," ucap Alex.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Toms Tohir pun langsung merespons usulan KPK mengenai harus adanya larangan penyaluran bansos sebelum Pilkada. Toms mengatakan, bakal mengingatkan pemimpin di daerah terkait imbauan KPK tersebut.

"Jadi imbauan-imbauan akan kita lakukan, ya, untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah, seperti yang Pak Pimpinan KPK sampaikan," ujar Toms di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3/2024).

Kendati begitu, Toms belum tegas menjawab apakah larangan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk Perda atau aturan-aturan mengingat lainnya. Untuk aturan, kata dia, harus melalui proses panjang.

"Berkaitan dengan peraturan daerah, itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya. Kalau kami di pusat, kan, ada proses yang panjang," imbuh dia.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (20/3/2024) pukul 09.58 WIB, harga beras medium turun 0,77% menjadi Rp14.210 per kilogram (kg) dibandingkan hari sebelumnya.

Sedangkan, harga beras premium stagnan dengan harga Rp16.540 per kg. Harga beras medium hari ini masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp10.900-Rp11.800 per kg. (wid,rls,ant,ist/dya)

12.800.000.000.000

7.700.000.000.000

1.100.000.000.000

900.000.000.000

800.000.000.000

Kemensos

Kemenkes

Kemenag

Kemendikbudristek

BNPB

**REALISASI BELANJA BANSOS
BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(1 JANUARI-29 FEBRUARI 2024)**

Sumber: Kementerian Keuangan

MK Kabulkan Gugatan Kepala Daerah yang Keberatan Masa Jabatan 4 Tahun

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan 11 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020. Diketahui, mereka permasalahan masa jabatan yang tidak penuh 5 tahun.

"Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon a quo yang hanya ingin memaksimalkan masa jabatannya hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024," papar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan, Rabu (20/3/2024).

Menurut Saldi, memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah suatu bentuk keseimbangan.

Atas pertimbangan itu, MK mengabulkan gugatan sepanjang terkait Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024."

MK memutuskan bahwa para kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 bisa terus menjabat sampai kepala daerah pengganti mereka dilantik. Namun, tetap dengan ketentuan masa jabatan mereka tak lebih dari 5 tahun.

Untuk diketahui, permohonan tersebut diajukan oleh Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumbang Mahyeldi, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Bupati Malaka Simon Nahak, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Bupati Malang Sanusi, Bupati Nunukan Asmin Laura, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, Wali Kota Bontang Basri Rase, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir.

Para Pemohon menunjuk Visi Law Office yang diisi Donal Fariz, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang sebagai kuasa hukumnya. Mereka adalah kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020. Merujuk UU Pemilu, masa jabatan mereka akan berakhir pada 2024. Sebab, Pilkada Serentak akan digelar pada November 2024.

Mereka meminta MK menguji konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut para pemohon, implementasi pasal tersebut



Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan 11 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 soal masa jabatan yang tidak penuh 5 tahun, Rabu (20/3/2024). (ist)

menyebabkan masa jabatan para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 menjadi tidak utuh lima tahun. Dinilai merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai kepala daerah yang memegang masa jabatan selama lima tahun.

Dalam amar putusannya, MK pun menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian. "Mengadili dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan amar putusan.

"Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang semula menyatakan, 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan,'" lanjutnya.

"Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi menyatakan, 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan,'" pungkash Suhartoyo.

Sementara itu, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim konstitusi, yakni Daniel Yusmic P. Foekh. "Terhadap putusan MK a quo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh," imbuh Suhartoyo.

"Yang pada pokoknya berpendapat menyampaikan bahwa Mahkamah semestinya melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap sidang pleno untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif," tandasnya

Tolak Pilkada Digeser ke 2025

Sedangkan, terkait gugatan norma Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 ditolak MK. Sebab dinilai tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, serta prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945.

Penggugat dalam gugatan meminta MK menyatakan Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024." Bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara serentak untuk 276 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada bulan November 2024 dan pemungutan suara serentak untuk 270 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan Kepala

Daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025'.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, Mahkamah telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu bulan November 2024. Hal itu sebagaimana Putusan MK nomor 12/PUU-XXII/2024. Meskipun, tidak diumumkan dalam putusan tersebut.

Walhasil, permintaan untuk mengubah jadwal pilkada serentak dari November 2024 menjadi Desember 2025 ditolak oleh MK. "Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK, Suhartoyo. (wid,rls,ist,ant/dya)

AMAR PUTUSAN MK TERHADAP GUGATAN 11 KEPALA DAERAH

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan".

Sehingga norma pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi menyatakan "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Komisi B DPRD Jatim Minta Operasi Pasar Ditingkatkan Dua Kali Lipat



Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi.

puasa, dan juga mendekati hari Raya Idulfitri. “Kita mendorong operasi pasar murah, karena itu tanggung jawab pemerintah untuk memastikan seluruh yang ibadah puasa dan menjelang Idulfitri ini semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, jangan sampai kekurangan keurangan,” tandasnya, Rabu (20/3/2024).

Politisi asal Malang ini tidak menginginkan ibadah puasa umat muslim di Jatim terhambat atau tidak nyaman dengan mahalnya harga bahan pokok. Kemudian, masyarakat juga terganggu rasa suka cita mereka di Hari Raya Idulfitri nanti.

“Oleh sebab itu, kita dorong operasi-operasi pasar itu lebih intensif dilakukan, bila perlu dua kali lipat yang ada. Uang yang ada (alokasi APBD) kita belanjakan untuk kepentingan rakyat, karena sekarang ini kondisi masyarakat kita ini lagi susah,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan, jangan

sampai di Jawa timur terkenal sebagai lumbung pangan nasional justru rakyatnya mengalami kekurangan di saat mereka memerlukan. Maka dia menegaskan bahwa manajemen stok harus dilihat kembali dan dievaluasi.

“Seharusnya hal-hal seperti ini (kenaikan harga saat Ramadan dan menjelang Idulfitri) bisa diprediksi, karena ini peristiwa setiap tahun. Kalau setiap tahun terus mengalami kelangkaan, berarti kita gagal di dalam melakukan prediksi dan juga stok yang cukup,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, manajemen stok ini menjadi yang utama karena juga bisa menunjang operasi pasar terus dilakukan. Daniel menandakan, DPR tentu sangat mendorong diperbanyak operasi pasar dan berkoordinasi dengan kabupaten kota, sebab mereka harus melakukan operasi pasar.

“Jadi, ini bukan masalah provinsi saja tapi juga masalah kabupaten kota, bahkan pemerintah pusat pun harus turun. Kemarin saya dengar walau kita merasa kecewa, tapi ada informasi bahwa impor beras sudah turun di Mayangan, itu tolong dicek dulu. Kalau itu memang terjadi maka segera didistribusikan pada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan manfaat di dalam kondisi susah

seperti ini,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, Satgas pangan juga harus bekerja lebih keras lagi untuk melihat distribusi pangan ini. “Mudah mudahan nanti kita berharap pada musim panen ini sudah mulai memberikan hasil yang maksimal, sehingga bisa menemnuhi pangan. Tapi yang penting bagi saya, kelangkaan pangan, harga pangan naik ini petani kita sejahtera apa tidak. Kalau petani tidak sejahtera kita menangis, artinya sia sia,” tandasnya.

“Kalau pemerintah membeli pangan dengan harga mahal di pateni, artinya petani juga mendapatkan keuntungan maksimal. Saat saat ini seharusnya mereka bersuka cita karena beras dihargai mahal. Tapi, kalau sampai ternyata harga naik dan tidak berdampak pada mereka, itu satu keprihatinan yang luar biasa, tiada guna satgas pangan bekerja keras,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pengawasan terhadap harga pangan ini harus diperketat. Kemudian, operasi pasar juga diintensifkan dan itu harus terkordinir, jangan sampai operasi pasar jatuh ke orang tertentu juga. “Jangan sampai pada saat operasi pasar ada yang memborong,” pungkasnya. (lut/dya)

SURABAYA – Untuk menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras yang belakangan ini harganya cukup tinggi, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Daniel Rohi meminta pada pemerintah untuk memperbanyak operasi pasar. Bahkan, lanjutnya, operasi pasar bisa dilakukan hingga dua kali lipatnya saat ini.

Daniel juga merasa prihatin dengan mahalnya harga besar pada bulan Ramadan di mana umat muslim sedang menjalankan ibadah

silaturahmi.

“Pemkot Surabaya tidak bisa berjalan sendiri. Dan tonggak Pemkot Surabaya itu tak bisa berjalan tanpa PKB,” papar orang nomor satu di Surabaya itu.

Menurut Eri, selama ini, kemiskinan hingga stunting turun berkat kerjasama dengan banyak pihak. Dia menyatakan, kebersamaan lebih penting daripada sebuah jabatan. “Saya nahdliyin. Mas Abdul Ghoni itu nahdliyin, Gus Syaifuddin Zuhri juga,” ungkapnyanya.

Dia berharap PKB bisa terus bersinergi membangun Kota Surabaya. Sehingga bisa membuktikan Surabaya sebagai kota santri representasi saat para kyai kumpul kalazaman dulu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, belum berkenan memberikan tanggapan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada November. Cak Ji mengatakan saat ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Sik akeh kerjoan (masih banyak pekerjaan), Rek!” ujar Cak Ji,

menggunakan logat khas Suroboyoan, Rabu (20/3/2024).

Cak Ji bersama dengan Wali Kota Eri Cahyadi, berkomitmen kuat untuk fokus pada penyelesaian program dan pembangunan di Kota Surabaya. Di Bulan Ramadhan ini, salah satu fokus utama adalah masalah sembako yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

“Oleh karena itu, Pemkot bersama sejumlah pihak getol menggelar pasar murah untuk menjamin agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” ungkap Cak Ji.

Selama tiga tahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Kota Surabaya telah mengalami berbagai terobosan dan inovasi yang dirasakan langsung oleh warganya. Prestasi dan program yang telah dilaksanakan menjadi bukti nyata dari keberhasilan mereka dalam memimpin kota.

Eri Cahyadi Silaturahmi ke PKB Surabaya, Sinyal Dukungan?

SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menghadiri acara Ta’aruf Caleg PKB Terpilih DPRD Surabaya Tahun 2023 di DPC PKB Surabaya, Ketintang, Rabu (20/3/2024). Apakah kedatangan Eri ini sebagai sinyal kemungkinan adanya dukungan dari PKB untuk Pilkada mendatang?

“Kalau ke depan mendukung Pak Eri di Wali Kota Surabaya periode kedua asli selesai,” kata Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf yang duduk di samping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Eri tak sendirian. Dia ditemani beberapa kader PDIP Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Budi Leksono, hingga Abdul Ghoni Muklas.

Eri yang mendengar kalimat Musyafak hanya tersenyum. Orang nomor satu di Surabaya itu tak memberikan balasan kalimat Musyafak Rouf. “PKB Surabaya itu berintegritas dan solid, patuh terhadap partai,” ucap Musyafak Rouf.

Di tempat yang sama, Eri mengungkapkan, dirinya dengan Musyafak kalah pamor. Dia menyampaikan bahwa kedatangan dirinya ke DPC PKB karena

silaturahmi.

Menurut Eri, selama ini, kemiskinan hingga stunting turun berkat kerjasama dengan banyak pihak. Dia menyatakan, kebersamaan lebih penting daripada sebuah jabatan. “Saya nahdliyin. Mas Abdul Ghoni itu nahdliyin, Gus Syaifuddin Zuhri juga,” ungkapnyanya.

Dia berharap PKB bisa terus bersinergi membangun Kota Surabaya. Sehingga bisa membuktikan Surabaya sebagai kota santri representasi saat para kyai kumpul kalazaman dulu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, belum berkenan memberikan tanggapan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada November. Cak Ji mengatakan saat ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Sik akeh kerjoan (masih banyak pekerjaan), Rek!” ujar Cak Ji,

menggunakan logat khas Suroboyoan, Rabu (20/3/2024).

Cak Ji bersama dengan Wali Kota Eri Cahyadi, berkomitmen kuat untuk fokus pada penyelesaian program dan pembangunan di Kota Surabaya. Di Bulan Ramadhan ini, salah satu fokus utama adalah masalah sembako yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

“Oleh karena itu, Pemkot bersama sejumlah pihak getol menggelar pasar murah untuk menjamin agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” ungkap Cak Ji.

Selama tiga tahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Kota Surabaya telah mengalami berbagai terobosan dan inovasi yang dirasakan langsung oleh warganya. Prestasi dan program yang telah dilaksanakan menjadi bukti nyata dari keberhasilan mereka dalam memimpin kota.



Eri tampak duduk di samping Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf.

Dalam bidang infrastruktur, Pemkot Surabaya telah membangun jalan sepanjang 584.036,15 meter dari tahun 2021 hingga 2023, melalui metode flexible pavement dan rigid pavement.

Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi prioritas, dengan 105.846 titik penerangan yang telah dipasang hingga tahun 2023 di 7.960 lokasi, dan rencana pembangunan PJU di 7.586 titik pada tahun 2024. (lut/dya)

Pemkab Blitar Anggarkan THR Rp 44,9 Miliar, Termasuk untuk Bupati dan DPRD

BLITAR - Untuk mencukupi kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H tahun 2024 bagi ASN dan Non ASN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 44,9 miliar. Termasuk untuk bupati, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto membenarkan kalau untuk THR tahun ini di Pemkab Blitar, anggarannya telah ditetapkan pada APBD 2024. "Karena sudah ada aturan tentang THR yaitu PP No 14/2024, maka anggarannya juga sudah dialokasikan sesuai kebutuhan," ujar Kurdiyanto, Rabu(20/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan Kurdiyanto mengacu pada aturan tersebut, pihaknya telah mengalokasikan THR untuk 9.195 orang ASN dan Non ASN. "Dimana ASN terdiri dari PNS sebanyak 6.292 orang dan PPPK 2.852 orang, serta Non ASN 51 orang," jelasnya.

Adapun total anggaran THR yang dibutuhkan sebesar Rp 44,9 miliar, dimana untuk PNS dan PPPK mendapatkan THR dengan komponen gaji pokok, tunjangan pangan,

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). "Besarnya THR mengacu pada komponen penghasilan Maret 2024 ini, ditambah 1 kali atau 100 persen TPP paling banyak yang diterima tiap bulan. Demikian juga untuk Non ASN, yaitu bupati dan pimpinan serta anggota DPRD besarnya juga mengacu penghasilan Maret 2024," terang Kurdiyanto.

Rincian anggaran THR 2024 di lingkup Pemkab Blitar, untuk PNS Rp 33,2 miliar dan PPPK Rp 11,5 miliar serta sisanya Rp 250 juta untuk Non ASN yang terdiri dari Bupati Blitar dan 50 orang pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Jumlah anggaran THR 2024 ini diungkapkan Kurdiyanto meningkat dibanding 2023 lalu, karena adanya kenaikan gaji ASN sekitar 8 persen. "Serta perbedaan aturan, jika tahun kemarin tunjangan TPP hanya 50 persen, tahun ini diberikan penuh 100 persen," bebernya.

Ditanya kapan THR dicairkan, Kurdiyanto mengaku saat masih



Karena sudah ada aturan tentang THR yaitu PP No 14/2024, maka anggarannya juga sudah dialokasikan sesuai kebutuhan,"

KURDIYANTO
Kepala BPKAD
Kab Blitar,

proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Karena sesuai aturan, untuk mencairkan THR harus ada Perbup yang kini sudah diproses Bagian Hukum Setda Pemkab Blitar. "Kalau

sesuai aturan paling cepat H-10 hari kerja, sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 26 Maret 2024 ini. Diupayakan bisa tepat waktu pencairannya," pungkas Kurdiyanto. (ais/lut)

Sebanyak 45 Ibu-ibu Mengaku Tertipu Arisan Idul Fitri



Suyanti (tengah) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak sambil menunjukkan bukti transfer yang dilampirkan dalam laporan.

SURABAYA - Sedikitnya 45 ibu-ibu di Bulak Setro, Surabaya mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan arisan Idul Fitri 1445 H dengan total kerugian Rp 250 juta. Ibu-ibu yang banyak bekerja sebagai buruh lepas itu telah melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (20/03/2024) sore. Namun laporannya ditolak lantaran alat bukti yang dirasa kurang oleh penyidik.

Suyanti (38) salah satu perwakilan korban menceritakan, awalnya arisan itu dijalankan oleh SC (46) istri dari KS (61) yang juga satu kampung dengan

para korban. Pada bulan Oktober 2023, SC meninggal dunia. Arisan pun dilanjutkan oleh suaminya KS.

"Jadi arisan ini sudah 4 tahun ada memang sebagai arisan Idul Fitri. Nah ketika SC meninggal dunia itu, suaminya KS yang gantian memegang. Namanya ya sudah percaya kita tetap melanjutkan agar punya simpanan untuk hari raya besok mas," kata Suyanti saat diwawancarai Beritajatim.com di halaman Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (20/03/2024).

Para member arisan tetap

melanjutkan pembayaran sampai dijanjikan uang akan dibagikan pada tanggal Selasa (05/03/2024) kemarin. Namun, KS malah menghilang dengan mengosongkan kamar kos dan menjual berbagai barang di tokonya.

Warga pun tidak ada yang mengetahui keberadaan KS. Dari data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibawa warga, KS diduga juga melakukan pemalsuan di KTP-nya. Dalam Kartu Keluarga, KS tercatat sebagai warga kelahiran Sidoarjo. Namun, pada fotokopi KTP yang dibawa warga, KS memiliki kelahiran Madura.

"Total uangnya ada Rp 250 juta mas. Ada sekitar 45 orang itu satu kampung di Bulak Setro yang ikut," imbuh Suyanti.

Suyanti mengaku kecewa dengan laporannya yang ditolak oleh polisi. Ia mengatakan bahwa selama ini mereka menjalankan arisan secara sederhana. Walaupun telah membawa 2 bukti transfer yang ditujukan untuk membayar arisan, warga diminta pulang untuk melengkapi bukti adanya kegiatan arisan dan bukti transaksi agar penyidik bisa menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).

"Kami sekarang bingung mau bagaimana. Uang kami dibawa kabur sementara selama ini kan kami

menjalankan arisan itu sederhana sekali dan banyak transaksi yang langsung diberikan. Ada buku catatan, namun sebelum tanggal 5 kemarin sudah diminta oleh KS," tutup Suyanti.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Prasetyo menjelaskan bahwa para pelapor tidak membawa bukti transaksi adanya penyerahan uang dalam arisan itu termasuk bukti transfer. Sehingga polisi menghimbau agar para pelapor bisa melengkapi bukti agar polisi bisa memproses.

"Peristiwanya ada atau gak kita kan belum tahu, makanya perwakilan itu menyerahkan bukti penyerahan uang itu. Nah ini gak ada sama sekali. Sekedar ngomong doang, makanya kita suruh melengkapi itu dulu ketika ada nanti. Kalau salah satu catatan baru kita tampung," kata Prasetyo saat dihubungi wartawan.

Selain itu, pelapor juga tidak mempunyai bukti apakah uang arisan dipegang oleh KS. Ia menjelaskan, apabila uang arisan dipegang oleh sang istri, maka perkara ini gugur demi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Bukti penyerahan arisan tidak ada terus apa yang menunjukkan kalau uang itu ada serah terima ke orangnya," tutur Prasetyo. (lut/dya)

Soal Nasib Direksi Perumda Tugu Tirta, Pj Wali Kota Malang Putuskan Jumat Besok



Tower SPAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang, September 2023. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, akan segera menentukan nasib Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang pada Jumat (22/3/2024) besok. Keputusan ini menyusul kritik dari DPRD Kota Malang, yang menilai Pemkot kurang tegas dalam menentukan apakah jabatan Direksi

tersebut akan diperpanjang atau tidak. Mengingat masa jabatan Direksi Tugu Tirta akan habis pada 1 April 2024 mendatang.

Wahyu mengatakan, posisinya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota, mengharuskan dirinya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. "Terlebih ini kan terkait pergantian Direksi, jadi Surat Keputusan (SK) harus ada izin dari Kemendagri," ujar Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/3/2024).

Setelah berkoordinasi dengan Kemendagri, Pj Wahyu menjelaskan, keputusan terkait Direksi Perumda Tugu Tirta menjadi wewenang mutlak dari Kuasa Pemilik Modal (KPM). Hal ini dikarenakan status Perumda Tugu Tirta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Jadi saya bisa langsung untuk melaksanakan tanggung jawab saya selaku KPM untuk memutuskan

apakah Direksi Perumda Tugu Tirta akan diperpanjang atau di ganti. Jika diganti, nanti kami akan membentuk panitia seleksi (pansel)," tambahnya.

Selain itu, Wahyu juga mengumumkan bahwa Kamis (21/3/2024) besok, pihaknya akan mengadakan rapat dengan pembina BUMD Kota Malang, yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemkot Malang, serta Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (PISDA) Kota Malang.

Dalam rapat tersebut, Wahyu berencana untuk membahas hasil penilaian dari dewan pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta, mengenai kinerja Direksi selama masa jabatannya. Hasil evaluasi tersebut, sambung Wahyu, akan menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan nasib Direksi Perumda Tugu Tirta.

"Jumat (22/3/2024) nanti insyaallah kepastiannya. Kalau memang tidak diteruskan, nanti membentuk pansel. Kemudian 1 April (masa akhir jabatan Direksi) harus ada Pelaksana tugas (Plt). Tapi nanti jika keputusannya diperpanjang, berarti tidak ada pansel," tutup Wahyu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyoroti

ketidakpastian terkait masa jabatan anggota Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang yang akan segera berakhir. Ia menekankan perlunya langkah tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menghindari spekulasi di kalangan masyarakat.

Arief juga menekankan, belum terbentuknya pansel dalam 2 pekan menjelang berakhirnya masa jabatan, secara implisit dianggap sebagai indikasi adanya perpanjangan masa jabatan Direksi Tugu Tirta. Arief menilai, perpanjangan tersebut sebagai opsi yang baik asalkan diambil dengan tegas, mengingat Dewas juga telah memberikan rekomendasi penilaian yang lengkap terhadap kinerja Direksi. (Santi/Dya)



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lenteratoday)

Santuni Anak Yatim, Bupati Sanusi Salurkan Rp 4,4 Miliar

MALANG - Bupati Malang, Sanusi mengunjungi setiap kecamatan guna mendistribusikan santunan bagi para anak yatim piatu di Ramadan tahun ini. Dengan alokasi dana sebesar Rp 4,4 miliar, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Sanusi mengatakan, meski awalnya diajukan anggaran sebesar Rp 6 miliar, namun setelah dilakukan verifikasi data, jumlah tersebut ternyata hanya mencapai Rp 4,4 miliar. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh data yang telah dimutakhirkan, sehingga hanya 4.400 dari 6.000 anak yang memenuhi syarat yang dapat menerima bantuan.

"Diperkirakan ada 6 ribu (anak yatim piatu), ternyata setelah diverifikasi hanya yang memenuhi syarat yang diajukan, jadi ada 5.000. Tapi yang terdata sekarang masih 4.400. Saya sih maunya bisa 5 ribu, jadi masih ada 600 kuota," ujar Sanusi, Rabu (20/3/2024).

Sanusi menyebutkan, setiap anak yang menjadi penerima bantuan tersebut akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1 juta, yang disalurkan secara langsung kepada

mereka.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kegiatan penyaluran santunan di tahun ini mengalami perubahan skema dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya para anak yatim piatu dipusatkan di Pendopo Agung Kota Malang, kini Pemkab Malang yang mendatangi langsung di setiap kecamatan.

Hal ini menurutnya dilakukan sebagai respons atas keluhan dari beberapa camat dan kepala desa, mengenai kesulitan membawa anak-anak tersebut ke pendopo yang terletak di Jalan Merdeka Timur Kota Malang.

"Apa lagi yang kayak di Kecamatan Ampelgading, itu pula ya capek. Jadi kasihan, makanya saya yang mengalah datang," terang Sanusi.

Terkait syarat penerima bantuan ini, Sanusi menegaskan bahwa penerima bantuan harus lolos verifikasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, dengan syarat maksimal usia di bawah 16 tahun.

Dalam konteks ini, menurutnya pengajuan penerima bantuan dilakukan melalui prosedur resmi, dimulai dari desa ke kecamatan, dan



Bupati Malang, Sanusi, saat menyerahkan bantuan uang tunai kepada anak yatim di Kecamatan Ampelgading. (Dok. Prokopim Kabupaten Malang)

kemudian ke Dinas Sosial. Data calon penerima kemudian diverifikasi ulang untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan.

"Makna Ramadan kita harus banyak beramal, banyak berbuat yang terbaik untuk ibadah kita," tukas Sanusi.

Sebagai informasi, hingga Selasa (19/3/2024) kemarin, total sebanyak 175 anak yatim piatu telah menerima bantuan. Dengan penyaluran meliputi Kecamatan Gondanglegi sebanyak 75 anak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan 70 penerima, dan Kecamatan Bantur dengan 30 penerima bantuan. (Santi/Dya)

dr Richard Lee

Jadi Komisaris Newlab

NEWLAB, jenama perawatan tubuh dan kecantikan mengumumkan kolaborasi strategisnya dengan pebisnis, pemengaruh sekaligus dokter kecantikan terkemuka di Indonesia, dr. Richard Lee, MARS., Ph.D yang akan menempati posisi komisaris.

Meliani Muljoredjo, CEO Newlab, menyambut baik kehadiran Richard Lee dan sangat yakin kalau sosoknya akan membawa kemajuan inovasi mutakhir bagi perusahaan.

“Tujuan kami mengangkat dr. Richard Lee sebagai Komisaris, karena dua alasan. Pertama kita tahu sosok beliau adalah dokter kecantikan yang kritis terhadap produk beauty. Kedua, karena ia aktif memberi edukasi positif ke publik,” ujar Meliani dalam keterangannya diterima di Jakarta pada Sabtu.

Selama ini, lewat siniar-nya Richard memang telah banyak memberi edukasi kepada masyarakat, tentang bagaimana cara memilih dan memilah, produk kecantikan yang baik dan aman.

“Buat saya pribadi, keputusan bergabung dengan Newlab untuk membuktikan, bahwa saya memang peduli terhadap perkembangan industri kecantikan ini. Meski bukan saya pemilik produk ini, saya tetap bisa support asalkan produknya bagus. Bahkan, saya mau terlibat langsung untuk memberi arahan dan masukan. Namun dengan catatan tadi, produknya memang bagus, aman dan terpercaya,” ujar Richard, saat ditanya alasannya mau bergabung dengan Newlab.

Yang pasti pengangkatan posisi baru ini, bukan hanya sekadar terkait menghadirkan sosok seorang komisaris, namun juga tentang bagaimana memberi kesempatan bagi Newlab, untuk memperoleh pandangan dan arahan dari ahli berpengalaman.

“Dua tahun terakhir saya memang ingin mengembangkan bisnis. Maka saya mencari perusahaan bagus yang bisa diakuisisi. Saya berkeliling, ketemu banyak perusahaan yang senang saya mau investasi. Namun dalam banyak hal, ternyata mereka tertutup. Nah, Newlab ini luar biasa terbuka. Saya cek, keuangan mereka bersih, cash-flownya bagus, marketingnya luar biasa, dan cara mereka berkomunikasi ke publik sangat bertanggung jawab, makanya saya bersedia bergabung,” tambah Richard.

Meliani berharap, dengan bergabungnya Richard akan semakin banyak orang yang mengenal jenama ini, dan hal itu sejalan dengan misi Newlab yang bertujuan, menjawab kebutuhan wanita Indonesia untuk bisa ingin tampil cerah, bugar dan glowing.

Selain itu, dalam rangka menyambut hadirnya bulan suci Ramadan 2024 dan bergabungnya Richard dalam keluarga Newlab, jenama ini jadi semakin aktif meluncurkan kampanye sebagai bentuk dukungan kepada wanita Indonesia.

Salah satunya, kegiatan giveaway THR Lebaran senilai Rp50 juta sebagai dorongan untuk para wanita, agar dapat menginspirasi perempuan lain untuk dapat menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

Profil dr Richard Lee

Richard Lee dilahirkan di Medan pada tanggal 11 Oktober 1985. Ia berasal dari keluarga kurang mampu, selama masa sekolahnya, kedua orang tuanya sering meminta Pastor Paroki untuk membantu mengurangi biaya pendidikannya.

Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan nilai memuaskan di SMA Xaverius 1 Palembang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (2003-2009).

Richard berhasil melanjutkan studinya ke Fakultas Pascasarjana Universitas Respati Indonesia dengan mengambil program studi Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) pada 2013.

Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan di American Academy of Aesthetic Medicine pada 2017 dan Atlantic International University (2020-2021).

Perjalanan Karier dr Richard Lee

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sriwijaya, Richard Lee memulai kariernya dengan menjadi dokter di salah satu perusahaan milik Sinarmas Group Palembang.

Melalui kerja kerasnya, Richard Lee berhasil meraih posisi sebagai Direktur Utama di salah satu anak perusahaan Sinarmas Group yang bergerak di bidang kesehatan.

Kehidupan Richard semakin

membaik setelah bertemu dengan Renie Effendi, seorang dokter, di tempat kerjanya. Mereka kemudian menikah dan bersama-sama memutuskan untuk membangun usaha klinik kecantikan bernama Klinik Athena di Palembang.

Klinik ini menjadi salah satu klinik kecantikan terbesar di Pulau Sumatera dengan 10 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran Klinik Athena telah menjadi prestasi gemilang dalam karier dan bisnis dr. Richard Lee dan istrinya. Kini sudah ada beberapa cabang yang tersebar, ada di Palembang, Jakarta Medan, Lampung, dan Makassar.

Selain meraih kesuksesan dalam bisnis kecantikan, ia juga berhasil menjadi seorang YouTuber terkenal. Kanal YouTube pribadinya dengan nama dr. Richard Lee, MARS telah berhasil menarik lebih dari 4,19 juta subscribers. Pada kanal YouTube ini, dr. Richard Lee mengangkat berbagai tema, seperti tips kecantikan dan perawatan diri, review produk, serta melakukan podcast bersama sejumlah sosok terkenal (Antara/BeritaSatu).



Buat saya pribadi, keputusan bergabung dengan Newlab untuk membuktikan, bahwa saya memang peduli terhadap perkembangan industri kecantikan ini. Meski bukan saya pemilik produk ini, saya tetap bisa support asalkan produknya bagus. Bahkan, saya mau terlibat langsung untuk memberi arahan dan masukan. Namun dengan catatan tadi, produknya memang bagus, aman dan terpercaya,”



DETEKSI DINI PENTING

PERLAMBAT PROGRES GLAUKOMA

DOKTER dari Rumah Sakit Mata Cicendo Dr Elsa Gustianty mengatakan deteksi dini penting guna mencegah glaukoma agar tidak semakin parah, karena pada tipe tertentu, tidak ada gejala pada awalnya dan glaukoma tidak dapat diobati.

"Kenapa sih glukoma itu banyak sekali menyebabkan kebutaan? Karena di fase awalnya dia tidak bergejala, sehingga orang tidak memeriksakan ke dokter. Mereka tidak aware bahwa mereka itu sakit. Mereka datang pada saat sudah terlambat, sudah lapang pandangnya menyempit-menyempit seperti melihat dari lubang kunci," katanya dalam "Cegah Kebutaaan Akibat Glaukoma" yang disiarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta.

Pada glaukoma terbuka, kata Elsa, awalnya memang tidak ada gejala, namun pada glaukoma tertutup, gejala yang sering dialami adalah sering pusing dan sakit kepala, termasuk saat banyak membaca atau beraktivitas jarak dekat di tempat gelap.

Ia mengatakan tipe glaukoma yang sering ditemukan di Indonesia adalah glaukoma sudut tertutup. Sudut itu adalah sudut bilik mata bagian depan

di mana air dalam mata dikeluarkan.

Adapun pada glaukoma akut, katanya, tekanan bola mata pada penderitanya tiba-tiba naik mendadak sehingga mata merasa kesakitan yang hebat. Biasanya, kata dia, satu mata berwarna merah dan pandangan langsung buram.

"Sakitnya itu luar biasa sampai bisa mual muntah. Seringnya orang itu salah datang ke emergency, dipikir ini sakit maag atau tumor otak atau apa, tapi salah satunya bisa karena glukoma serangan akut tadi," katanya.

Secara global, ujarnya, 80 juta orang mengidap kondisi itu. Di Indonesia, kata Elsa, glaukoma adalah penyebab kebutaan nomor dua. Adapun yang pertama adalah katarak

Menurutnya, risiko glaukoma meningkat seiring bertambahnya usia. Satu dari 200 orang berusia 40 tahun mengalami glaukoma dan peluang terkena glaukoma semakin meningkat ketika bertambah tua, yaitu satu dari delapan ketika berusia 80 tahun.

Selain itu, katanya, apabila ada anggota keluarga yang punya glaukoma maka risikonya mengidap penyakit itu menjadi 10 kali lipat.

Dia menyarankan bagi yang

berumur 40-60 tahun untuk memeriksakan diri sekali dalam dua sampai tiga tahun dan di atas 60 tahun harus periksa setiap tahun. Glaukoma, kata Elsa, adalah suatu penyakit yang sifatnya kronis dan progresif yang merupakan bagian dari penyakit degeneratif pada syaraf mata.

Dia menuturkan glaukoma dapat menyerang siapa saja, namun tidak dapat diobati karena kondisi tersebut adalah efek dari proses degeneratif, layaknya rambut yang memutih. Dia menjelaskan seiring bertambahnya usia, maka akan ada syaraf-syaraf yang mati.

Pada glaukoma, kata dia, tekanan di mata disebabkan oleh air yang tidak dapat disirkulasikan mata ke pembuluh darah. Karena produksi air berlebih, katanya, kemudian ditambah dengan hambatan di penyaluran itu, maka salurannya terhambat.

Hambatan tersebut, katanya, meningkatkan cairan pada mata, hingga akhirnya menekan syaraf-syaraf serta pembuluh darah di belakang mata, hingga akhirnya syaraf-syaraf itu mati perlahan.

Dia menyebut syaraf memiliki keunikan sendiri sehingga ketika ada

satu syaraf yang mati, maka di sekitarnya juga ikut mati. Oleh karena itu, katanya, glukoma bersifat progresif.

Glaukoma merupakan penyakit syaraf mata yang bisa menimbulkan gangguan penglihatan terutama adanya gangguan lapang pandang yang sifatnya semakin lama bisa semakin memberat, dengan faktor risiko utama peningkatan tekanan bola mata.

Akibat peningkatan tekanan bola mata ini yakni kerusakan pada serat lembut syaraf optik yang bertugas membawa sinyal penglihatan dari mata ke otak.

Pada sebagian besar kasus, penyakit ini awalnya muncul tanpa gejala yang disadari pasien. Namun, saat kondisi sudah lebih lanjut, tanda yang biasanya dialami pasien salah satunya gangguan lapang pandang yang menyempit.

Kondisi ini bisa menyebabkan pasien mengeluhkan sering tersandung saat berjalan, kemudian apabila sudah memberat maka menyebabkan penglihatan pasien seperti mengintip dari lubang kunci. Selain itu, tanda lainnya, yakni mata terasa pegal mulai ringan sampai sangat nyeri di mata (Antara)

"Kenapa sih glukoma itu banyak sekali menyebabkan kebutaan? Karena di fase awalnya dia tidak bergejala, sehingga orang tidak memeriksakan ke dokter. Mereka tidak aware bahwa mereka itu sakit. Mereka datang pada saat sudah terlambat, sudah lapang pandangnya menyempit-menyempit seperti melihat dari lubang kunci,"

Dokter dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Dr Elsa Gustianty



SPEKIMEN TANAMAN CHARLES DARWIN BERUMUR 200 TAHUN DIPAMERKAN UNTUK PUBLIK

SPEKIMEN tanaman yang dikumpulkan oleh Charles Darwin dalam pelayaran Beagle telah ditemukan dalam sebuah arsip di Universitas Cambridge.

Spesimen langka yang telah disimpan dalam arsip herbarium Universitas Cambridge selama hampir 200 tahun ini diberikan oleh Darwin kepada guru dan temannya, Prof John Stevens Henslow, pendiri Kebun Raya Universitas Cambridge.

Kini arsip-arsip tersebut akan diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya dalam sebuah film dokumenter TV Channel 5 yang mengeksplorasi hubungan antara Darwin dan Henslow.

"Henslow adalah pelopor pengajaran botani dan mentor yang hebat bagi Darwin," kata Dr Edwin Rose, sejarawan sains di Cambridge. Dia mengatakan Darwin, yang belajar teologi di Cambridge, mengambil kursus botani Henslow sebanyak tiga kali.

Henslow, seorang pendeta lokal, mengajarkan apa yang kemudian disebut teologi alam.

"Ini adalah tentang mengumpulkan contoh-contoh ciptaan alam - yaitu berbagai spesimen spesies tanaman yang berbeda - sehingga mereka dapat memahami kebijaksanaan pencipta ilahi dan bagaimana Tuhan menciptakan dunia," kata Rose.

"Itulah salah satu pendorong



Spesimen herbarium yang dikumpulkan oleh Charles Darwin. Beberapa berisi campuran koleksi dalam satu lembar © RBG Kew.

utama untuk melakukan studi tentang alam pada awal abad ke-19."

Ketika kapten aristokrat Beagle, Robert Fitzroy, mencari seorang ilmuwan naturalis untuk menemaninya dalam pelayaran pada tahun 1831, Henslow menolak peran tersebut, merekomendasikan Darwin yang masih berusia 22 tahun untuk posisi tersebut.

Darwin kemudian dengan setia mengirimkan spesimen tanaman kepada guru lamanya, yang kemudian membalas dengan memuji hasil karyanya namun mengeluhkan

pengemasannya, dan kini disimpan untuk generasi mendatang di perpustakaan Universitas Cambridge.

"Apa pun yang Darwin bisa kumpulkan dan kirimkan ke Henslow dipandang sebagai aset karena Henslow sedang aktif membangun koleksi museum botani Cambridge pada saat itu," kata Rose.

Hal ini dianggap sebagai sumber daya pengajaran yang "masif" untuk memfasilitasi program pedagogis Henslow, yang berusaha untuk "memahami rancangan Sang Pencipta" dan luasnya ciptaan Tuhan yang tak

terbatas.

Sebagai hasilnya, universitas ini menyimpan setidaknya 1.000 spesimen yang dikumpulkan oleh Darwin di herbariumnya, yang didirikan pada tahun 1761 dan sekarang terdiri dari sekitar 1,1 juta spesimen tanaman dari seluruh dunia, termasuk 50.000 "jenis spesies" - spesimen asli yang digunakan untuk mendeskripsikan spesies baru.

"Hampir semua tanaman yang dikumpulkan Darwin, yang sekarang ada di herbarium, adalah spesimen jenis," kata Rose.

"Dia memiliki mata yang tajam untuk menemukan spesies yang baru bagi ilmu pengetahuan Eropa pada saat itu. Hampir semua yang dia kumpulkan, tidak ada seorang pun di Inggris yang pernah melihatnya sebelumnya."

Spesies - spesies ini "sama sekali tidak dikenal" oleh orang Eropa ketika Darwin mengirimkannya kepada Henslow, mencatat pengamatannya tentang perannya di Kepulauan Galápagos. "Darwin mengamati kadal dan burung-burung yang menggunakannya sebagai sumber makanan dan air," kata Rose.

"Memahami interaksi yang lebih luas antara alam ini - bagaimana rantai makanan yang berbeda bekerja, tetapi juga kondisi lingkungan yang unik yang menyebabkan hewan-hewan ini berevolusi dengan cara yang sangat spesifik - meletakkan dasar bagi teori evolusi Darwin." (The Guardian/Penerjemah: Lambang-mk)



6 TIPS TURUNKAN BERAT BADAN SAAT PUASA, BATASI KONSUMSI GULA

SELAIN beribadah, puasa saat bulan Ramadhan kerap dijadikan momen untuk menurunkan berat badan bagi sebagian orang. Mengingat selama hampir 12 jam seseorang harus menahan haus dan lapar.

Namun, meskipun sudah berpuasa seharian, tetapi ada pula sebagian orang yang justru mengalami kenaikan berat badan selama bulan puasa.

Mengutip dari laman Times of India, setelah berpuasa orang-orang cenderung makan berlebih, sehingga erat kaitannya dengan penambahan berat badan.

Tips menurunkan berat badan saat puasa. Maka dari itu, jika ingin mengurangi berat badan selama puasa, bisa simak tips berikut:

1. Batasi asupan gula

Puasa seharian dapat membuat tubuh merasa lelah, dan mengonsumsi gula saat berbuka puasa bisa memberi energi instan pada tubuh.

Akan tetapi perlu diingat bahwa gula juga mengandung kalori yang tinggi, sehingga bisa membuat berat badan bertambah.

Maka dari itu sebaiknya batasi jumlah gula yang dikonsumsi supaya tidak berlebihan dan berujung membuat berat badan bertambah.

2. Konsumsi makanan sehat

Dibanding mengonsumsi makanan serba manis dan aneka gorengan, pilihlah makanan sehat dan seimbang untuk disantap saat buka puasa. Anda bisa mengisi asupan gizi dengan makanan kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat kompleks.

3. Bagi makanan jadi porsi kecil

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat berbuka puasa rasa lapar dan haus membuat sebagian orang buru-buru menyantap makanan dan minuman. Sebaiknya, makanlah makanan berbuka puasa secara perlahan, mulailah dengan porsi kecil dahulu. Setelah itu lanjutkan makan sekitar satu atau dua jam setelahnya.

Jika menyantap semua makanan sekaligus, tubuh cenderung akan mengonsumsi lebih banyak kalori dari biasanya. Sehingga bisa memicu penambahan berat badan.

4. Nikmati makanan perlahan

Jangan asal menyantap makanan saat berbuka puasa, sebaiknya santap makanan atau minuman secara perlahan.

Ketika hendak makan secara cepat, otak tidak bisa mengenali kapan waktu perut akan kenyang. Sehingga, akan membuat kamu makan lebih banyak dari biasanya. Mengunyah makanan secara perlahan dan menikmati setiap gigitan akan memberi waktu pada otak untuk mengenali tanda kenyang.

5. Jaga tubuh tetap terhidrasi

Guna mengimbangi puasa 12 jam, usahakan perbanyak minum air putih setelah berbuka puasa.

Normalnya, seseorang perlu minum air putih setidaknya dua sampai tiga liter per hari. Maka dari itu kamu bisa memenuhi kebutuhan air bagi tubuh saat sahur dan berbuka supaya

tetap terhidrasi.

6. Jangan langsung tidur setelah makan

Rasa kenyang usai menyantap makanan kerap membuat tubuh merasa mengantuk. Jangan tidur setelah makan, usahakan tubuh tetap bergerak sedikit supaya bisa membakar kalori dan menghindari penumpukan lemak.

Bergerak sedikit usai berbuka juga dapat membantu mencerna makanan dan mencegah perut kembung. (Kompas)



Senja Kala PPP ... (dari Hal 1)

KETUA DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengaku terkejut lantaran PPP gagal memenuhi ambang batas untuk melaju ke Senayan. Awiek menyebut hasil rekapitulasi KPU berbeda dengan hasil internal PPP. "Tentu kami terkejut dengan hasil rekapitulasi secara bertentangan karena tidak sesuai berbeda dengan data internal kami," kata Awiek di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Meski begitu, Awiek mengatakan pihaknya tetap menghormati proses yang telah berjalan di KPU. Dia menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami memiliki waktu tiga hari, setelah pengumuman resmi dari KPU untuk mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

"Dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, kami ingin mengembalikan suara PPP yang hilang," sambung dia.

Menurutnya, dari hasil rekapitulasi internal, PPP dapat mencapai 4,04% atau melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun, kata dia, hasil perolehan suara KPU ternyata berbeda dengan hasil internal.

"Yang jelas data-data kami sangat lengkap dan ketika nanti menggugat ke Mahkamah Konstitusi semuanya akan kami lampirkan bukti bukti tersebut," paparnya.

Awiek menuturkan ada selisih 100-150 ribu suara dari hasil internal PPP dan rekapitulasi KPU. Awiek memastikan pihaknya akan memperjuangkan selisih suara tersebut. "Ada selisih sekitar 100 sampai 150 ribu suara. Dan kami ingin itu bisa membuktikan semua, di mana pergeseran-pergeseran suara itu. Tentu kami akan all out di Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Terkait tidak lolosnya PPP, membuat sejumlah pengamat dan politisi di luar PPP turut prihatin. Pasalnya, PPP merupakan salah satu partai tertua yang telah lama berdiri. "Berduka untuk Pe Tiga," tulis pengamat politik Hendri Satrio melalui akun X @satriohendri.

"Sebagai partai "senior" yg telah ikut mewarnai pemilu & parlemen kita sejak tahun 70 an — dimana puncaknya Pemilu 1977 meraih suara hampir 29 persen — turut bersimpati dan berduka atas tidak lolosnya PPP di pemilu kali ini," tulis politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun @jansen_jsp. "Semoga kedepan PPP dapat "come back" dan kokoh kembali!," lanjut dia.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Kristian Widya Wicaksono mengatakan ada 2 faktor yang memicu kondisi PPP saat ini. Faktor pertama, kata dia, masalah perpecahan pada tubuh internal partai yang berimbas pada tidak solidnya kekuatan internal dan mereduksi kekuatan Partai Politik dalam menggalang dukungan pemilih. Faktor kedua, metode kampanye PPP yang tidak banyak berubah dengan masih mengandalkan dukungan dari basis massa tradisional partainya.

Sebelumnya, rekapitulasi nasional suara pemilihan legislatif (pileg) 2024 telah selesai. Berdasarkan hitungan secara manual ada 8 parpol yang meraih suara di atas 4% sehingga dinyatakan lolos parlemen, PPP dan PSI tidak mencapai 4%.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi tergusur dari Senayan karena hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.630 suara, maka PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya empat persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk partai politik yang sempat terbelah dualisme kepemimpinan itu untuk membalikkan keadaan.

Pada pemilu 2024 ini, suara sah pileg secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil). Dihitung secara manual dari data yang telah diumumkan KPU, terdapat 8 partai politik yang meraih suara lebih dari 4%. Di antaranya, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan NasDem.

PDJ-P meraih suara terbanyak pada Pileg DPR RI 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam. Dari hasil itu, PDJ-P sukses memborong 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.630 suara, maka PDJ-P berhasil meraup 16,72 persen suara.

Di bawah PDJ-P, Partai Golkar membuntuti dengan perolehan 23.208.654 suara. Partai besutan Airlangga Hartarto berhasil mendapat

15,29 persen suara sah nasional.

Sementara itu, Partai Gerindra ada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22 persen dari total suara sah nasional. Melengkapi posisi empat besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) besutan Muhaimin Iskandar mengantongi 10,62 persen suara sah nasional setelah mengoleksi 16.115.655 suara.

Prabowo-Gibran Unggul di 36 Provinsi

Sementara itu hasil final rekapitulasi nasional Pilpres 2024 di 38 provinsi, paslon 02 Prabowo-Gibran menang dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud MD. Papua menjadi provinsi terakhir yang direkap KPU RI pada Rabu (20/3/2024) sore. Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul di Papua.

"Demikian tadi pembahasan rekapitulasi hasil Pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi di Papua. Bisa kita sahkan ya? Bismillah sah," kata Ketua KPU Hasyim Asyari di Pane A, Ruang Sidang KPU, Jakarta.

Prabowo-Gibran meraih 378.908 suara di Papua. Ganjar-Mahfud meraih 178.534 suara. Sementara Anies-Muhaimin meraih 67.592 suara. Dengan begini, Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi. Sedangkan Anies-Muhaimin unggul di 2 provinsi dan Ganjar-Mahfud tidak unggul di provinsi manapun.

Meski begitu, KPU belum mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi keseluruhan Pemilu 2024. KPU masih melanjutkan rekapitulasi untuk DPR dan DPD di Provinsi Papua--provinsi terakhir yang direkap KPU RI.

Melihat hasil tersebut, Capres 03 Ganjar Pranowo menyebut dirinya dan cawapres Mahfud MD akan mengantarkan secara langsung gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ganjar dan Mahfud akan ke MK bersama tim hukum. "Insyaallah," kata Ganjar singkat di Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Terkait kapan gugatan akan dilayangkan ke MK, ia mengatakan pihaknya akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. "Ya, sesuai jadwal MK. Kita ikuti saja. Yang tahu prosedur, Pak Mahfud paling nggak, punya pengalaman di sana," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, ia menuturkan sejak awal Pilpres seluruh kekuatan Paslon 03 sudah dikerahkan. Namun, kata dia, terjadi kecurangan yang masih terjadi di lapangan selama pemilu berlangsung. "Kita tunggu aja. Kita sudah siap dari awal. Semua calon sudah siap dari awal. Ini proses yang biasa saja. Yang tidak biasa adalah cerita-cerita yang muncul di masyarakat. Yang kita mesti buktikan kondisinya," ucap Ganjar.

Karena itu, eks Gubernur Jateng itu menuturkan pihaknya akan menyelesaikan proses pemilu dengan menggugat hasil perolehan suara 2024 ke MK. "Semua ada awalnya. Semua ada akhirnya. Maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh UU. Itu aja yang mau kita lakukan," tutup dia. (wid,rls,ist,ant/dya)

HASIL REKAPITULASI PILPRES TINGKAT NASIONAL DI 38 PROVINSI			
Sumber: KPU per 20/3/2024			
Wilayah	Anies - Muhaimin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud
D.I. YOGYAKARTA	496.280	1.269.265	741.220
GORONTALO	227.354	504.662	41.508
KALIMANTAN TENGAH	256.811	1.097.070	158.788
BALI	99.233	1.454.640	1.127.134
BANGKA BELITUNG	204.348	529.883	151.109
LAMPUNG	791.892	3.554.310	764.486
KALIMANTAN BARAT	718.641	1.964.183	534.450
SUMATERA SELATAN	997.299	3.649.651	606.681
JAWA TIMUR	4.492.652	16.716.603	4.434.805
JAWA TENGAH	2.866.373	12.096.454	7.827.335
DKI JAKARTA	2.635.762	2.692.011	1.115.138
KEP. RIAU	370.671	641.388	140.733
NUSA TENGGARA TIMUR	153.446	1.798.753	958.505
KALIMANTAN UTARA	72.065	284.209	51.451
KALIMANTAN SELATAN	849.948	1.407.684	159.950
BANTEN	2.451.383	4.035.052	720.275
KALIMANTAN TIMUR	448.046	1.542.346	240.143
SULAWESI TENGGARA	361.585	1.113.344	90.727
SULAWESI BARAT	223.153	533.757	62.514
RIAU	1.400.093	1.931.113	357.298
PAPUA BARAT	37.459	172.965	120.565
BENGKULU	229.681	893.499	145.570
SULAWESI UTARA	119.103	1.229.069	283.796
SUMATERA BARAT	1.744.042	1.217.314	124.044
SULAWESI SELATAN	2.003.081	3.010.726	265.948
ACEH	2.369.534	787.024	64.677
NTB	850.539	2.154.843	241.106
PAPUA SELATAN	41.906	162.852	110.003
JAMBI	532.605	1.438.952	234.251
SUMATERA UTARA	2.339.620	4.660.408	999.528
MALUKU UTARA	200.459	454.943	91.293
SULAWESI TENGAH	386.743	1.251.313	160.594
MALUKU	228.557	665.371	186.395
JAWA BARAT	9.099.674	16.805.854	2.820.995
PAPUA BARAT DAYA	48.405	209.403	99.899
PAPUA TENGAH	128.557	636.616	335.089
PAPUA PEGUNUNGAN	284.184	838.382	175.956
PAPUA	67.592	378.908	178.534

Perdagangan Orang Berkedok Magang Bareskrim Duga 33 Universitas di Indonesia Terlibat



(Ilustrasi) Unjuk rasa terkait perdagangan manusia (human trafficking) terus dilakukan secara masif diberbagai belahan dunia. (dok.ist)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Ferein Job.

Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, kasus ini bermula dari laporan 4 orang mahasiswa yang sedang mengikut program Fereinjob mendatangi Kedutaan Republik Indonesia (KBRI) Jerman.

"Setelah dilakukan pendalaman hasil dari KBRI mengungkap bahwa program ini dijalankan oleh 33 Universitas di Indonesia," kata Djuhandhani melalui keterangan resmi yang dibagikannya pada Rabu, (20/3/2024). Sebanyak 1.047 mahasiswa ini terbagi ke 3 agen tenaga kerja di Jerman.

Perihal kronologi kejadiannya, kata Djuhandhani, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGEN dan PT. SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter Of Acceptance).

"Para mahasiswa juga harus membayar dana talangan sebesar Rp30.000.000 sampai Rp 50.000.000 ucap Djuhandhani. Dana talangan itu nantinya dipotong dari penerimaan gaji setiap bulan.

Setiba di Jerman, para mahasiswa diberikan surat kontrak kerja oleh PT SHB untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami. Mereka mau tidak mau harus menandatangani surat kontrak kerja dan working permit. Para korban diminta untuk menjalankan ferienjob dalam waktu 3 bulan mulai dari Oktober 2023 sampai Desember 2023.

PT SHB, lanjut Djuhandhani, sudah menjalin kerjasama dengan Universitas yang sudah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU). Disebutkan bahwa ferienjob masuk ke dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Mereka juga menjanjikan program magang yang dapat dikonversikan menjadi 20 SKS.

Dalam hal ini Dittipidum Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, seluruhnya warga negara Indonesia (WNI). "Dua orang berada di Jerman," kata Djuhandhani.

Mabes Polri telah bekerja sama dengan divisi hubungan internasional dan KBRI Jerman untuk penanganan dua tersangka yang berada di Jerman.

Kelima tersangka ini terdiri dari SS (laki-laki) 65 tahun, AJ (perempuan) 52 tahun, MZ (laki-laki) 60 tahun. Sedangkan kedua tersangka yang masih berada di Jerman yaitu ER alias

EW (perempuan) 39 tahun, A alias AE (perempuan) 37 tahun.

Mereka dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Lalu Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

Ada juga pasal pidana tambahan yakni pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan yang ditujukan kepada pengurus PT.SHB untuk mendirikan koperasi dalam bidang usaha yang sama.

Respon Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan program Ferienjob bukan merupakan bagian dari program MBKM. Meski PT SHB sudah pernah mengajukan, Kemendikbudristek menolak program itu sebab kalender akademik di Indonesia tidak sama dengan Jerman.

Mekanisme program pemagangan dari luar negeri harus melalui usulan KBRI atau Kedubes terkait untuk diterbitkan surat endorsement bagi program tersebut.

Bareskrim Polri menambahkan, pihaknya kini juga tengah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhubinter Polri) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jerman, untuk penanganan dua tersangka itu.

"Kami berkoordinasi dengan pihak Divhubinter dan KBRI Jerman untuk penanganan terhadap 2 tersangka tersebut," katanya.

Adapun ER atau EW berperan menjalin kerja sama dan menandatangani MoU PT. SHB dengan unj (selaku dirut), serta menjanjikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang di dapatkan pihak universitas.

A alias AE berperan mempresentasikan program ferien job ke universitas untuk magang di Jerman, serta meyakinkan para mahasiswa untuk mengikuti program magang tersebut.

SS bertugas membawa program ferien job ke universitas, dan menjanjikan ke pihak kampus serta mahasiswa bahwa ferien job merupakan program unggulan agar mahasiswa siap bekerja, bahkan program tersebut dapat dikonversikan dengan 20 sks yang ada di indonesia.

Sementara, AJ merupakan ketua

pelaksana dalam proses seleksi peserta program ferien job, dan MZ selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang membidangi program magang di kampus. MZ juga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan peminjaman dana talangan guna mengikuti program tersebut.(wid,rls,ist/dya)

KRONOLOGI DUGAAN TPPO LIBATKAN 33 KAMPUS

- Modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Ferein Job.
- Kasus bermula dari laporan 4 orang mahasiswa yang sedang mengikut program Fereinjob mendatangi Kedutaan Republik Indonesia (KBRI) Jerman.
- Program ini dijalankan oleh 33 Universitas di Indonesia. Sebanyak 1.047 mahasiswa ini terbagi ke 3 agen tenaga kerja di Jerman.
- Para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGEN dan PT. SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter Of Acceptance). Juga harus membayar dana talangan sebesar Rp30.000.000 sampai Rp 50.000.000. Dana talangan itu nantinya dipotong dari penerimaan gaji setiap bulan.
- Setiba di Jerman, para mahasiswa diberikan surat kontrak kerja oleh PT SHB untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami.
- Para korban diminta untuk menjalankan ferienjob dalam waktu 3 bulan mulai dari Oktober 2023 sampai Desember 2023.
- Telah ditetapkan 5 tersangka ini terdiri dari SS (laki-laki) 65 tahun, AJ (perempuan) 52 tahun, MZ (laki-laki) 60 tahun. Sedangkan kedua tersangka yang masih berada di Jerman yaitu ER alias EW (perempuan) 39 tahun, A alias AE (perempuan) 37 tahun.
- Tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Lalu Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

